



PERUBAHAN RENCANA KERJA

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2023**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan Renja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 disebutkan bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan berpedoman pada :

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Semester I tahun berkenaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (SATPOL PP) Kabupaten Sampang Tahun 2023 dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Memperhatikan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 900/396/434.302/2023 tanggal 28 April 2023 hal : Pengurangan Alokasi Belanja APBD TA. 2023;
- b. Perangkat Daerah yang telah melakukan perubahan DPA melalui Perubahan Peraturan Bupati (mendahului P-APBD) agar diakomodir kembali pada Perubahan Renja dan RKA Perubahan TA. 2023; dan
- c. Indikator kinerja Program dan Kegiatan agar menyesuaikan dengan Perubahan Indikator Tujuan dan Sasaran beserta target kinerjanya.

Perubahan Renja SATPOL PP Kabupaten Sampang Tahun 2023 selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) SATPOL PP Kabupaten Sampang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja SATPOL PP Kabupaten Sampang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 09);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 1);

25. Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Sampang Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang; dan
27. Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja SATPOL PP Kabupaten Sampang Tahun 2023 adalah menyediakan acuan arah kebijakan melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan tahun 2023 sesuai dengan kondisi dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan semester I tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja SATPOL PP Kabupaten Sampang Tahun 2023, antara lain :

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun perubahan kinerja dan anggaran program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja SATPOL PP Kabupaten Sampang Tahun 2023, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Semester I Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisis pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh SATPOL PP Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja sampai dengan Semester I Tahun 2023 dan capaian Renstra SATPOL PP Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Perubahan Renstra SATPOL PP Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sampai dengan Tahun 2023.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Semester I Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Semester I dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Semester I)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Program dan Kegiatan Tahun 2019-2020										
	Tujuan 1 :									
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan LH dan Pananganan Bencana	Indek resiko bencana	100,00	0,53	0,63	0,55	114,55	0,73	1,81	45,00
	Tujuan 2 :									
	Meningkatnya Ke amanan, ketertiban dan Keamanan Lingkungan Serta Penyelesaian Konflik Sosial	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	100,00	9,65	10,70	10,70	100,00	20,00	40,35	10,09
	Sasaran 1 :									
	Meningkatnya pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Persentase Bahaya Kebakaran yang tertangani	100,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00	295	73,75
	Sasaran 2 :									
	Meningkatnya keten traman dan ketertib an masyarakat serta penegakan peraturan daerah	Persentase penanganan pelanggaran perda dan Ketertiban Umum	100,00	97,00	100,00	90,00	111,11	100,00	287	71,75
		Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif	100,00	55,91	70,97	50,00	141,94	85,48	191,39	47,85
		Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100,00	41,98	100,00	54,08	184,91	55,00	151,06	37,77

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00					97,24	100,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu (%)	100	100					100	100,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	2					1	100,00
		Jumlah dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1	1					1	100,00
		Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD (dokumen)	1	1					1	100,00
		Jumlah dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1	1					1	100,00
		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1	1					1	100,00
		Jumlah dokumen evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP) (dokumen)	3	3					3	100,00
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu (%)	100	100					86	86,00
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan	55	51					51	100,00
		Jumlah pengadaan alat tulis kantor (jenis)	40	40					54	105.88
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	1	1					1	100,00
		Jumlah laporan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD (dokumen)	3	2					2	100,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100	100					97	97.00
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	200	200					200	100.00

		Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan (ASN)	5	0					0	0.00
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100					81	81,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (jenis)	11	11					11	100.00
		Jumlah alat kebersihan yang disediakan dan Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (jenis, buah)	a) 25 b) 30	a) 25 b) 30					a) 20 b) 23	a) 80.00 b) 76.67
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (jenis, lembar)	c) 19 d) 16.000	a) 19 b) 16.000					a) 19 b) 16.000	a) 80.00 b) 76.67
		Jumlah bahan bacaan yang disediakan (Jenis)	2	1					1	100,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (orang)	60	60					60	100,00
		a. Jumlah pemenuhan makanan dan minuman rapat b. Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah c. Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	a. 200 b. 15 c. 40	a. 200 b. 15 c. 96					a. 185 b. 0 c. 96	a. 92.50 b. 0.00 c. 100.00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100					87	870,00
		Jumlah surat yang terkirim (surat)	700	700					889	127.00
		Jumlah jasa dan pengadaan instalasi komunikasi sumber daya air dan listrik (jenis)	3	3					3	100,00
		a. Jml jasa administrasi banpol PP b. Jml jasa administrasi honorer c. Jumlah jasa administrasi piket	a. 56 b. 7 c. 44	a. 56 b. 7 c. 44					a. 56 b. 7 c. 44	100,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100	100					88	88,00
		a. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara b. Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	a. 8 b. 28	a. 8 b. 28					a. 8 b. 28	a. 100.00 b. 100.00

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	47	40					21	100,00
		Jumlah gedung yang dipelihara	2	2					2	100,00
1.05.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu (%)	100	100					0	0,00
		Jumlah dokumen SKM (dokumen)	1	1					0,00	0,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	a. Persentase penanganan pelanggaran perda dan Ketertiban Umum b. Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif c. Persentase penurunan peredaran rokok ilegal	a. 100% b. 100% c. 100%	a. 97,00% b. 55,91% c. 41,98%					a. 97,00% b. 55,91% c. 41,98%	a. 100% b. 100% c. 100%
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum (%)	100	100					98,00	98,00
		Jumlah penanganan gangguan yang tertangani	98	98					98,00	100,00
		Persentase anggota linmas dan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	30	90					90,00	100,00
		Persentase kelengkapan dalam menunjang kinerja anggota satpolpp	5	0					0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda Yang Tertangani (%)	100	99					99,00	100,00
		Jumlah sosialisasi penegakan peraturan daerah kabupaten sampang dan peraturan Bupati Sampang	14	6					6	100,00
		Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sampang dan peraturan Bupati Sampang	14	9					9	100,00
		Jumlah patroli penegakan perda dan perkara / deteksi dini	14	9					9	100,00

1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota	Persentase pelanggaran perda (%)	98	98					98	100,00
		persentase pengembangan kapasitas dan karier PPNS	3	3					0	100,00
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	98	98					98	100,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani	100	59					59	100,00
		Jumlah alat penunjang kebakaran yang memenuhi standart	5	5					5	100,00
		Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	7	1					1	100,00
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	jumlah kegiatan inspeksi alat proteksi kebakaran yang dikerjakan	30	30					30	100,00
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah sosialisasi kebakaran yang dilaksanakan	28	17					17	100,00
Program dan Kegiatan Tahun 2021-2023										
	Tujuan :									
	Meningkatnya Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Persentase penurunn gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	25,00	9,65	10,70	10,70	100,00	20,00	40,35	10,09
	Sasaran :									
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum	100,00	9,60	100,00	90,00	111,11	100,00	287	71,75
		Persentase desa dengan satuan perlindungan masyarakat yang aktif	100,00	55,91	70,97	50,00	141,94	85,48	191,39	47,85

		Warga kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100,00	41,98	100,00	54,08	184,91	55,00	151,06	37,77
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	0	100,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	0	100,00
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	6	3	3	3	100	-	6	100,00
		<i>*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)</i>	6	-	-	-	-	0	0	0,00
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	2	1	1	1	100	-	2	100,00
		<i>*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	2	1	1	1	100	-	2	100,00
		<i>*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	2	1	1	1	100	-	2	100,00
		<i>*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	2	1	1	1	100	-	2	100,00

		<i>*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	10	5	5	5	100	-	2	100,00
		<i>*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)</i>	10	-	-	-	-	0	0	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>*) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	55	51	51	51	100	-	55	100,00
		<i>*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)</i>	55	-	-	-	-	51	51	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	40	40	40	40	100	43	43	100,00
		<i>* Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>	1	-	-	-	-	1	1	100,00
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun (dokumen)	2	1	1	1	100	-	2	100,00
		<i>*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Laporan Semesteran SKPD yang disusun (dokumen)	3	3	3	3	100	-	3	100,00
		<i>*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)</i>	3	-	-	-	-	2	2	50,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100,00

1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PDL Jumlah pakian dinas PDH	200	200	54	54	100	-	54	34.84
		*) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	155					54	54	100,00
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek implementasi perundang-undangan (orang)	5	4	5	4	80	-	4	80,00
		*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	5	-	-	-	-	4	4	80,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan (jenis)	19	24	22	22	100	-	22	100,00
		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	2	-	-	-	-	1	1	50,00
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang disediakan (jenis)	25	20	17	17	100	-	17	100,00
		Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (unit)	30	23	6	5	83,33	-	5	83,33
		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	3	-	-	-	-	2	2	50,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	19	19	9	9	100	-	9	100,00
		Jumlah belanja penggandaan yang disediakan (lembar)	16.000	17.291	11.800	12.400	105,08	-	12.400	105,08
		*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	-	-	-	-	1	1	50,00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2	2	1	1	100	-	1	100,00
		*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	2	-	-	-	-	1	1	50,00

1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu (orang kali)	60	60	60	60	100	-	60	100,00
		<i>*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat (orang kali)	200	200	66	66	100	-	66	100,00
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti (orang kali)	15	15	15	0	0	-	0	0
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti (orang kali)	40	40	40	40	100	-	40	100,00
		<i>*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	9	5	5	5	100	-	56	100,00
		<i>*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)</i>	0	-	-	-	-	-	0	#DIV/0!
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim (surat)	4400	889	1.000	668	66,80	-	668	66,80
		<i>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa dan pengadaan instalasi komunikasi sumber daya air dan listrik	24	12	12	12	100	-	24	100,00
		<i>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)</i>	3	-	-	-	-	3	3	50,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi banpol	107	107	104	104	100	-	104	100,00

		Jumlah tenaga kebersihan (orang bulan)	96	48	48	48	100	-	96	100,00
		<i>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	10	10	5	4	80	-	4	80,00
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	31	31	24	21	87,50	-	21	87,50
		<i>*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)</i>	21	-	-	-	-	21	21	100,00
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	40	21	47	19	100	-	19	40,43
		<i>*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)</i>	47	-	-	-	-	19	19	100,00
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	1	0	0	0	-	0	0,00
		<i>*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)</i>	1	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.01.2.13.	Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
5.03.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM (dokumen)	2	1	1	1	100	-	1	50,00
		<i>*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (laporan)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
01.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran perda dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	100	100,00

1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	100,00
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah penanganan gangguan yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100,00
		*) Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini	30	30	-	-	-	30	30	100,00
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	pelaksanaan penindakan pelanggaran bersama keamanan dan OPD terkaid	100	100	100	100	100	100	100	100,00
		*) Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	30	30	-	-	-	30	30	100,00
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase anggota linmas dan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	30	90	30	30	100	100	100	100,00
		*) Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	1	1	0	0	0	1	1	100,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum Yang Tertangani	100	100	100	100	100	-	100	100,00
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi penegakan peraturan daerah kabupaten sampang dan peraturan Bupati Sampang	14	14	6	6	100	-	100	100,00
		Jumlah sosialisasi penegakan hukum bidang cukai	14	14	14	14	100	14	14	100,00
		*) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada	2	2	2	2	100	2	2	100,00

1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penanganan atas pelanggaran peraturan Bupati Kabupaten Sampang	100	100	100	100	100	100.00	100	100,00
		*) Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	14	9	14	14	100	-	14	100,00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum	2	-	1	1	100	-	1	50,00
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	persentase pengembangan kapasitas dan karier PPNS	3	3	3	0	0	-	0	0
		*) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung	2	-	-	-	-	2	2	100,00

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2023 dan capaian Renstra SATPOL PP Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Renstra SATPOL PP Tahun 2019-2024 yang digunakan sebagai pedoman adalah Perubahan Renstra SATPOL PP Tahun 2019-2024 yang telah disesuaikan dengan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur serta hasil penajaman SAKIP Tahun 2022;
2. Program dan kegiatan yang digunakan pada tahun 2019-2020 adalah program dan kegiatan lama sesuai dengan yang terdapat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, sehingga kolom Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (kolom 6 s.d. 8) dan kolom Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Semester I) (kolom 9) tidak dapat terisi dikarenakan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sehingga sudah tidak relevan lagi;
3. Program dan kegiatan yang digunakan pada tahun 2021 s.d. 2023 adalah program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga baru dapat diisikan mulai kolom Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 hingga Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Semester I) yang kemudian dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 sehingga menyebabkan perubahan indikator sub kegiatan pada tahun 2023-2024; dan
4. Secara umum indikator kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 belum semuanya memenuhi target karena pengukurannya pada triwulan IV tahun 2023.

Implikasi yang timbul akibat kondisi di atas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah akan melakukan Perubahan Renja Tahun 2023 yang berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah akan melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2023 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

SATPOL PP Kabupaten Sampang mengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program-program SATPOL PP pada Tahun 2023 mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang pada Perubahan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Semester I Tahun 2023 dan Capaian Renstra SATPOL PP, adapun usulan perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan SATPOL PP Kabupaten Sampang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang

TUJUAN				SASARAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	20	20	Meningkatnya Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Persentase penurunn gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	20	20	
				Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum	100,00	100,00	
					Persentase desa dengan satuan perlindungan masyarakat yang aktif	86,02	86,02	
					Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100,00	100,00	

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang, baik uraian, indikator kinerja dan targetnya mengalami perubahan/penyesuaian berdasarkan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang (Hasil Penajaman SAKIP Tahun 2022).

Tabel 3.2
Matriks Rancangan Perubahan Renja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENJA AWAL				PERUBAHAN RENJA 2023				BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN PENTING (ALASAN PERUBAHAN)
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
1.05.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				8.725.664.195				8.519.684.325		-275.279.870	
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang	100%	6,591,811,748	DAU	Kab. Sampang	100%	5,917,853,086	DAU	-673.958.662	
1.05.01.2.01.	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kab. Sampang	100%	6,630,664	DAU	Kab. Sampang	100%	6,054,296	DAU	-576.368	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sampang	3 Dokumen	1,287,293	DAU	Kab. Sampang	3 dokumen	1,287,293	DAU	-	
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sampang	1 Dokumen	1,312,788	DAU	Kab. Sampang	1 dokumen	1,017,034	DAU	-295.754	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENJA AWAL				PERUBAHAN RENJA 2023				BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN PENTING (ALASAN PERUBAHAN)
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13
1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sampang	1 Dokumen	701,560	DAU	Kab. Sampang	1 dokumen	624,440	DAU	-77.120	
1 05 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sampang	1 Dokumen	1,221,293	DAU	Kab. Sampang	1 dokumen	1,203,473	DAU	-17.820	
1 05 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sampang	1 Dokumen	650,135	DAU	Kab. Sampang	1 dokumen	520,140	DAU	-129.995	
1 05 01 2.01 08	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sampang	3 Laporan	1,457,595	DAU	Kab. Sampang	3 dokumen	1,401,916	DAU	- 55.679	
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Kab. Sampang	100%	4,762,313,219	DAU	Kab. Sampang	100%	4,145,475,655	DAU	-616.837.564	
5.03.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sampang	52 Orang	4,742,840,275	DAU	Kab. Sampang	42 Orang	4,127,482,492	DAU	-615.357.783	
5.03.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Kab. Sampang	48 Jenis	18,222,243	DAU	Kab. Sampang	40 Jenis	16,992,761	DAU	-1.229.482	
5.03.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sampang	1 Laporan	615,920	DAU	Kab. Sampang	1 Laporan	492,697	DAU	-123.223	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENJA AWAL				PERUBAHAN RENJA 2023				BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN PENTING (ALASAN PERUBAHAN)
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13
5.03.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sampang	3 Laporan	634,781	DAU	Kab. Sampang	3 Laporan	507,705	DAU	-127.076	
5.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD	Kab. Sampang	0%	95,059,000	DAU	Kab. Sampang	100%	86,147,190	DAU	-8.911.810	
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PDL Jumlah pakian dinas PDH	Kab. Sampang	155 Paket	79,310,000	DAU	Kab. Sampang	2 orang	79,310,000	DAU	-	
5.03.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sampang	10 Orang	15,749,000	DAU	Kab. Sampang	5 orang	6,837,190	DAU	- 8.911.810	
5.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Sampang	100%	95,711,327	DAU	Kab. Sampang	100%	87,564,756	DAU	-8.146.571	
5.03.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sampang	1 Paket	5,392,016	DAU	Kab. Sampang	1 Paket	4,810,786	DAU	-581.230	
5.03.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sampang	1 Paket	9,166,961	DAU	Kab. Sampang	1 Paket	8,071,170	DAU	-1.095.791	
5.03.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sampang	2 Paket	6,569,350	DAU	Kab. Sampang	2 Paket	5,662,500	DAU	-906.850	
5.03.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sampang	1 Dokumen	1,800,000	DAU	Kab. Sampang	1 Dokumen	1,800,000	DAU	-	
5.03.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sampang	1 Laporan	2,940,000	DAU	Kab. Sampang	1 Laporan	2,450,000	DAU	-490.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENJA AWAL				PERUBAHAN RENJA 2023				BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN PENTING (ALASAN PERUBAHAN)
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13
5.03.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sampang	1 Laporan	69,843,000	DAU	Kab. Sampang	1 Laporan	64,770,300	DAU	-5.072.700	
5.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sampang	100%	1,532,497,924	DAU	Kab. Sampang	100%	1,518,487,014	DAU	-14.010.910	
5.03.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sampang	1 Laporan	1,606,924	DAU	Kab. Sampang	1 Laporan	1,400,814	DAU	-206.110	
5.03.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sampang	1 Laporan	96,727,200	DAU	Kab. Sampang	1 Laporan	82,922,400	DAU	-13.804.800	
5.03.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sampang	1 Laporan	1,434,163,800	DAU	Kab. Sampang	1 Laporan	1,434,163,800	DAU	-	
5.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Sampang	100%	99,275,232	DAU	Kab. Sampang	100%	73,914,113	DAU	-25.361.119	
5.03.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sampang	23 Unit	66,075,232	DAU	Kab. Sampang	23 Unit	59,314,113	DAU	-6.761.119	
5.03.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sampang	39 Unit	17,400,000	DAU	Kab. Sampang	34 unit	14,600,000	DAU	-2.800.000	
5.03.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sampang	1 Unit	15,800,000	DAU	Kab. Sampang	1 unit	0	DAU	- 15,800,000	
5.03.01.2.13.	Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	Kab. Sampang	100%	324,382	DAU	Kab. Sampang	100%	210,062	DAU	- 114.320	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENJA AWAL				PERUBAHAN RENJA 2023				BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN PENTING (ALASAN PERUBAHAN)
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13
5.03.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Sampang	0 Laporan	324,382	DAU	Kab. Sampang	100%	210,062	DAU	- 114.320	
5.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum	Kab. Sampang	100%	2,203,152,447	DAU	Kab. Sampang	100%	2,533,041,257	DAU	329.888.810	
00,5.03.02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pelanggaran perda dan Ketertiban Umum		100%	357,503,624	DAU	Kab. Sampang	100%	302,367,491	DAU	-55.136.133	
5.03.02.2.01.02.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	jumlah penanganan gangguan yang tertangani	Kab. Sampang	1 Dokumen	315,515,244	DAU	Kab. Sampang	1 Dokumen	268,152,742	DAU	-47.362.502	
5.03.02.2.01.03.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	pelaksanaan penindakan pelanggaran bersama keamanan dan OPD terkait	Kab. Sampang	1 Dokumen	28,501,745	DAU	Kab. Sampang	1 Dokumen	22,761,396	DAU	-5.740.349	
5.03.02.2.01.06.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	meningkatkanmy peran serta linmas desa dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah	Kab. Sampang	1 Dokumen	13,486,635	DAU	Kab. Sampang	1 Dokumen	11,453,353	DAU	-2.033.282	
5.03.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda Yang Tertangani	Kab. Sampang	100%	1,799,737,457	DAU	Kab. Sampang	100%	2,190,673,766	DAU	390.936.309	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENJA AWAL				PERUBAHAN RENJA 2023				BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN PENTING (ALASAN PERUBAHAN)
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13
5.03.02.2.02.01.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi Perda dan Perkada	Kab. Sampang	14 Kecamatan	1,459,806,215	DAU	Kab. Sampang	14 Kecamatan	1,861,501,775	DAU	401.695.560	
5.03.02.2.02.02.	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	Kab. Sampang	14 Kecamatan	8,960,001	DAU	Kab. Sampang	14 Kecamatan	0	DAU	-8,960,001	
5.03.02.2.02.03.	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah patroli penegakan perda dan perkada	Kab. Sampang	14 Kecamatan	330,971,241	DAU	Kab. Sampang	14 Kecamatan	329,171,991	DAU	-1.799.250	
5.03.02.2.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Perda	Kab. Sampang	100%	45,911,366	DAU	Kab. Sampang	100%	40,000,000	DAU	-5.911.366	
5.03.02.2.03.02.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	persentase pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Kab. Sampang	5 orang	45,911,366	DAU	Kab. Sampang	0 orang	40,000,000	DAU	-5.911.366	
TOTAL					8,794,964,195				8,450,894,343		-344.069.852	

Usulan anggaran perubahan Renja SATPOL PP Kabupaten Sampang Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 8.428.183.575,00 yang digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 1 urusan, 2 program, 10 kegiatan dan 32 subkegiatan.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) SATPOL PP Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2023 dan Perubahannya yaitu “Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia guna Mendukung Daya Saing Daerah menuju Sampang Hebat Bermartabat” pada Prioritas 4 “Menjaga Harmonisasi Kehidupan Masyarakat”.

Pada tahun 2023 berdasarkan Perubahan Renja SATPOL PP Kabupaten Sampang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan total anggaran **Rp. 8.450.894.344,00** yang digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 2 program, 10 kegiatan dan 32 sub kegiatan** serta hanya disediakan untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja SATPOL PP Kabupaten Sampang Tahun 2023 merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja SATPOL PP Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada Perubahan RKPD Kabupaten Sampang dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras, sinergi serta konsisten antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
2. Seluruh jajaran SATPOL PP Kabupaten Sampang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja SATPOL PP Kabupaten Sampang Tahun 2023 ini, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan SATPOL PP Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2023 dengan berpedoman kepada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023.

Sampang, 23 Agustus 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SAMPANG**



Drs. SURYANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680310 198809 1 002



LAMPIRAN

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PERLINDUNGAN MASYRAKAT
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023**